

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam laporan keuangan, khususnya pada laporan posisi keuangan terdapat salah satu akun yaitu aset tak berwujud. Akun ini merupakan akun yang menggambarkan nilai aset tidak berwujud yang dimiliki oleh instansi. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.14 tentang aset tak berwujud menerangkan bahwa Aset tak berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Dijelaskan dalam PSAP No.14 bahwa aset tak berwujud pemerintah dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan dan masa manfaat. Pada jenis sumber daya aset tak berwujud pemerintah dapat berupa *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak paten dan hak cipta, hasil kajian, aset tak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya dan aset tak berwujud yang dalam proses pengerjaan. Selanjutnya, aset tak berwujud pemerintah berdasarkan cara perolehan diperoleh dari pembelian, pengembangan secara internal, pertukaran, kerja sama, donasi/hibah, dan warisan budaya sejarah. Terakhir, aset tak berwujud pemerintah dapat diperoleh berdasarkan masa manfaatnya. Dalam hal ini, aset tak berwujud dapat diperoleh dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) dan dengan umur yang tidak terbatas (*indefinite life*).

Dilihat dari cara perolehan aset tak berwujud dapat diperoleh melalui banyak cara. Perbedaan cara perolehan aset tak berwujud membuat pengukuran nilai pada aset tak berwujud juga berbeda. Seperti pada pengembangan secara internal, aset yang dihasilkan akan memiliki nilai sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama dilakukannya kegiatan tersebut. Berbeda dengan aset tak berwujud yang diperoleh melalui pembelian, nilai yang diakui adalah sebesar seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset. Selain pada pengukurannya, pengakuan aset tak berwujud akan memiliki perbedaan.

PSAP No.14 menerangkan ATB Pemerintah dapat diakui jika aset tersebut dapat diidentifikasi, dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas, kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas dan biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.

Sebelum aset tak berwujud dapat diakui akan dilakukan pengidentifikasian. Identifikasi tersebut dilakukan sesuai dengan standar pengakuan aset tak berwujud yang sudah ditetapkan. Hasil penelitian/riset yang pengidentifikasiannya kurang tepat akan menimbulkan terjadinya neraca lebih tinggi (*overstated*) atau neraca menjadi lebih rendah (*understated*). Neraca mengalami *overstated* ketika hasil penelitian/riset diakui sebagai aset tak berwujud dimana kenyataannya hasil penelitian/riset tersebut tidak memiliki manfaat jangka panjang. Tidak diakuiinya hasil penelitian/riset yang sebenarnya memiliki manfaat jangka panjang akan menimbulkan *understated* pada neraca.

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian (BSDLP) adalah salah satu instansi pemerintah yang menghasilkan aset tak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.



berwujud melalui dua cara yaitu pengembangan internal dan pembelian. Dari dua cara perolehan tersebut BBSDLP mengakui empat jenis aset tak berwujud. Keempat aset tak berwujud tersebut adalah hasil kajian yang memiliki hasil akhir peta, hak cipta, *software* komputer dan peta RBI skala menengah. Pada laporan posisi keuangan BBSDLP tahun 2018, nilai aset tak berwujud BBSDLP sebesar Rp27.728.454.093,00. Hasil kajian BBSDLP merupakan penyumbang nilai terbesar pada aset tak berwujud. Hal tersebut dikarenakan produk utama BBSDLP yaitu sebuah peta merupakan hasil akhir dari hasil kajian.

Aset tak berwujud yang diperoleh melalui pengembangan internal pada BBSDLP yaitu hasil kajian, hak cipta dan *software* komputer. Selain melalui pengembangan internal, BBSDLP juga mengakui aset tak berwujud yang diperoleh melalui pembelian. Aset tak berwujud tersebut adalah *software* komputer dan Peta RBI skala menengah. BBSDLP menggunakan *software* komputer, Peta RBI skala menengah dan hak cipta sebagai penunjang tugas utamanya. BBSDLP juga memanfaatkan aset tak berwujud berupa hasil kajian yaitu peta sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pengidentifikasi pengakuan Aset tak berwujud yang kurang tepat dapat membuat aset tak berwujud hanya dilihat sebagai belanja biasa, di mana biaya-biaya yang dikeluarkan untuk aset tak berwujud tersebut diperlakukan sebagai biaya operasional bukan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk aset jangka panjang. Hal ini membuat *output* yang dihasilkan dianggap tidak perlu di kapitalisasi sebagai aset. Aset yang tidak di kapitalisasi akan berdampak pada beban tahun berjalan yang terlalu besar. Biaya yang dikeluarkan untuk pembentukan aset tersebut hanya tercatat sebagai beban tahun berjalan, karena pengakuannya melalui belanja barang. Selain itu, dampak lainnya adalah aset yang dihasilkan dari kegiatan tidak termanfaatkan dan terpelihara dengan baik. Tidak tercatatnya hasil kegiatan sebagai aset membuat belanja pemeliharaan tidak dapat dialokasikan, sehingga pemeliharaan pada periode berikutnya akan terasa memberatkan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai Aset tak berwujud dan menuangkannya dalam sebuah laporan akhir dengan judul : **“Perlakuan Akuntansi Aset Tak Berwujud pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja Aset tak berwujud yang terdapat pada BBSDLP dan bagaimana cara perolehan aset tersebut?
2. Bagaimana pengakuan aset tak berwujud yang didapat melalui pembelian dengan aset tak berwujud yang dihasilkan sendiri oleh BBSDLP?
3. Bagaimana pengukuran aset tak berwujud yang didapat melalui pembelian dengan aset tak berwujud yang dihasilkan sendiri oleh BBSDLP?
4. Bagaimana penggunaan dan pemanfaatan aset tak berwujud yang dimiliki BBSDLP?
5. Bagaimana penghapusan aset tak berwujud pada BBSDLP?
6. Bagaimana perhitungan amortisasi aset tak berwujud pada BBSDLP?
7. Bagaimana pencatatan dan penyajian aset tak berwujud pada BBSDLP?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1.3 Tujuan

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai aset tak berwujud yang terdapat pada BBSDLP.
2. Menerangkan pengakuan aset tak berwujud yang didapat melalui pembelian dengan aset tak berwujud yang dihasilkan sendiri oleh BBSDLP.
3. Menerangkan pengukuran aset tak berwujud yang didapat melalui pembelian dengan aset tak berwujud yang dihasilkan sendiri oleh BBSDLP.
Menerangkan penggunaan dan pemanfaatan aset tak berwujud yang dimiliki BBSDLP.
Menerangkan penghapusan aset tak berwujud yang dimiliki BBSDLP.
Menguraikan amortisasi aset tak berwujud pada BBSDLP.
Menguraikan pencatatan dan penyajian aset tak berwujud pada laporan keuangan.

1.4 Manfaat

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk meningkatkan pengelolaan aset tak berwujud yang diakui oleh instansi pemerintah khususnya BBSDLP.

Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai referensi untuk penulisan tugas akhir sejenis dan diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aset tak berwujud bagi pembaca.

3. Bagi Penulis

Adanya tugas akhir ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman dan pengetahuan penulis mengenai aset tak berwujud. Selain itu juga untuk menambah wawasan penulis khususnya pada bidang akuntansi pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.